



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAAIN, WINI, DAN
MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
WILAYAH PERENCANAAN WINI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
WILAYAH PERENCANAAN WINI**

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 5.000




Sistem Grid : Geografis
Datum Horizontal : WGS 84

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)






IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

BATAS ADMINISTRASI

-  Batas Negara
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

BATAS WILAYAH PERENCANAAN

-  Batas Wilayah Perencanaan
-  Batas Sub-Wilayah Perencanaan
-  Batas Blok

SUMBER PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2013-2015 dan Survei Lapangan 2017, Badan Informasi Geospasial.
- Batas Negara RI-RDTL Tahun 2017.
- Delineasi BWP : Analisis Perencanaan Tahun 2015.

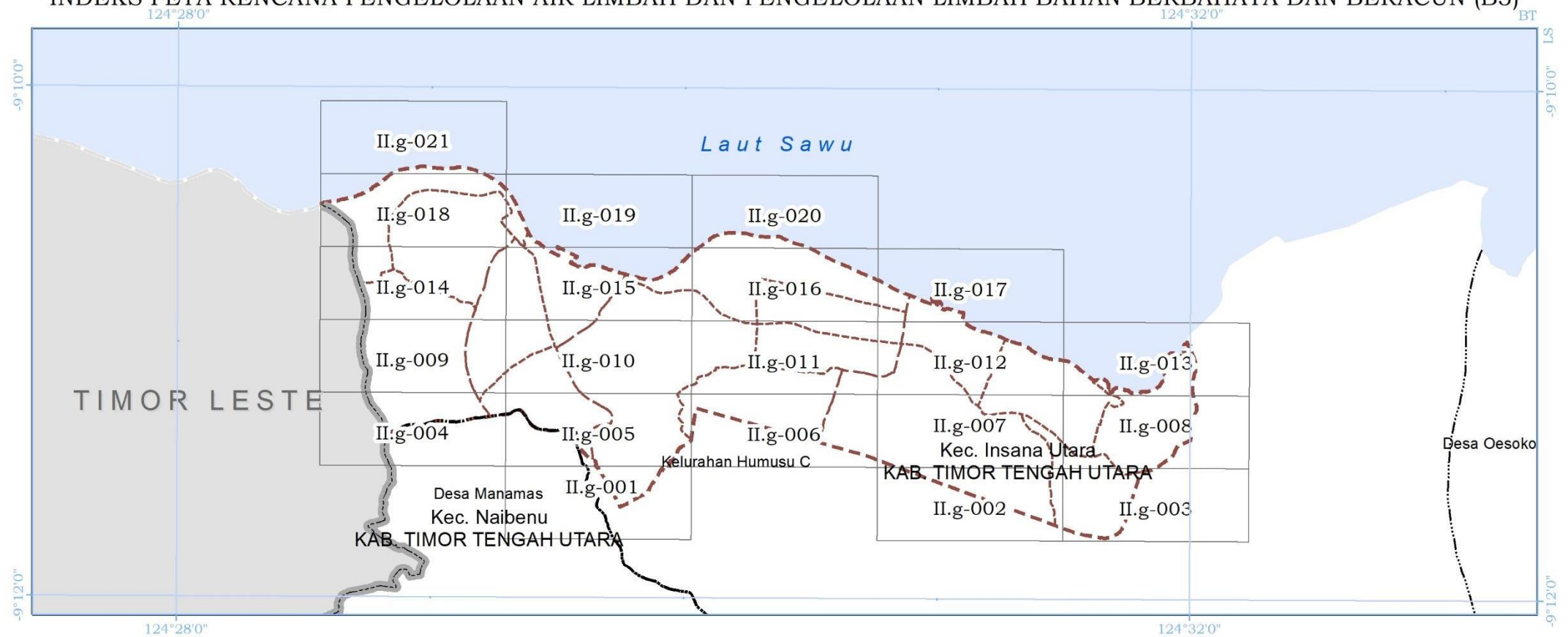
KETERANGAN PETA :

- Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perbatasan ini digambarkan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi Nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

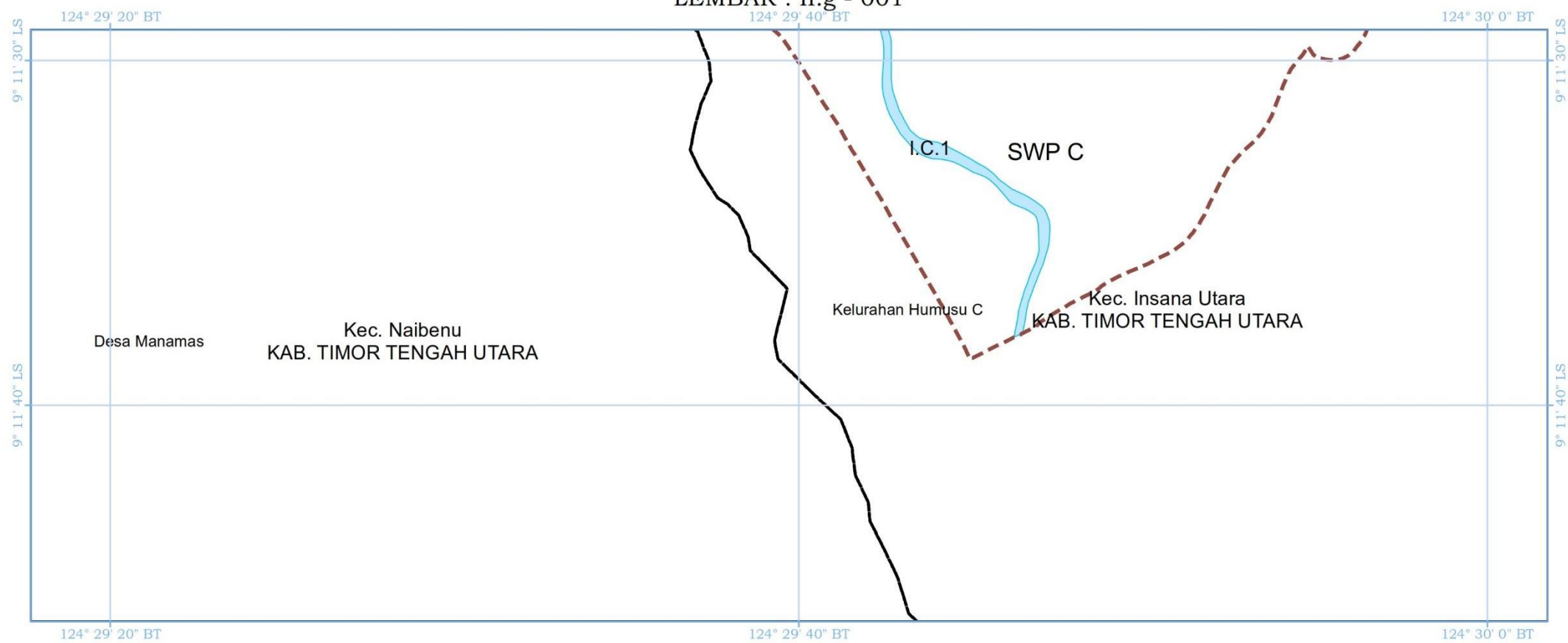
INDEKS PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

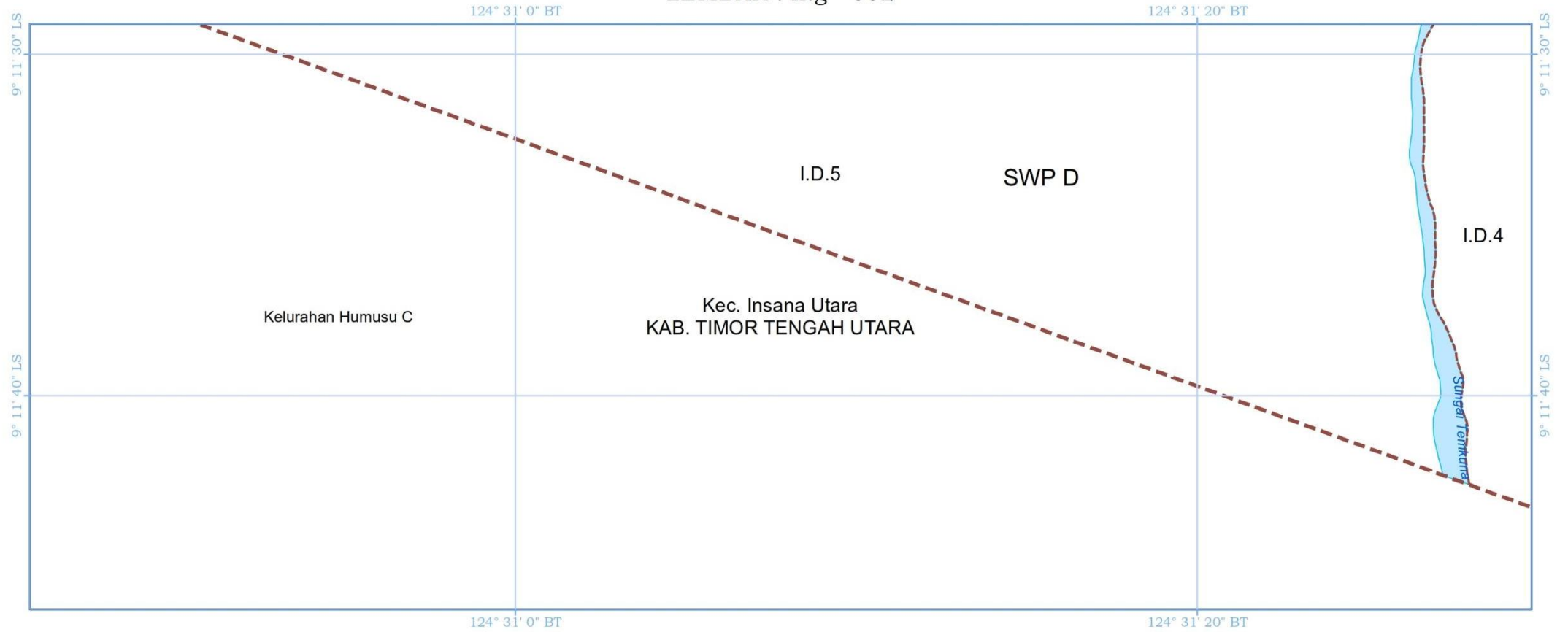
LEMBAR : II.g - 001





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

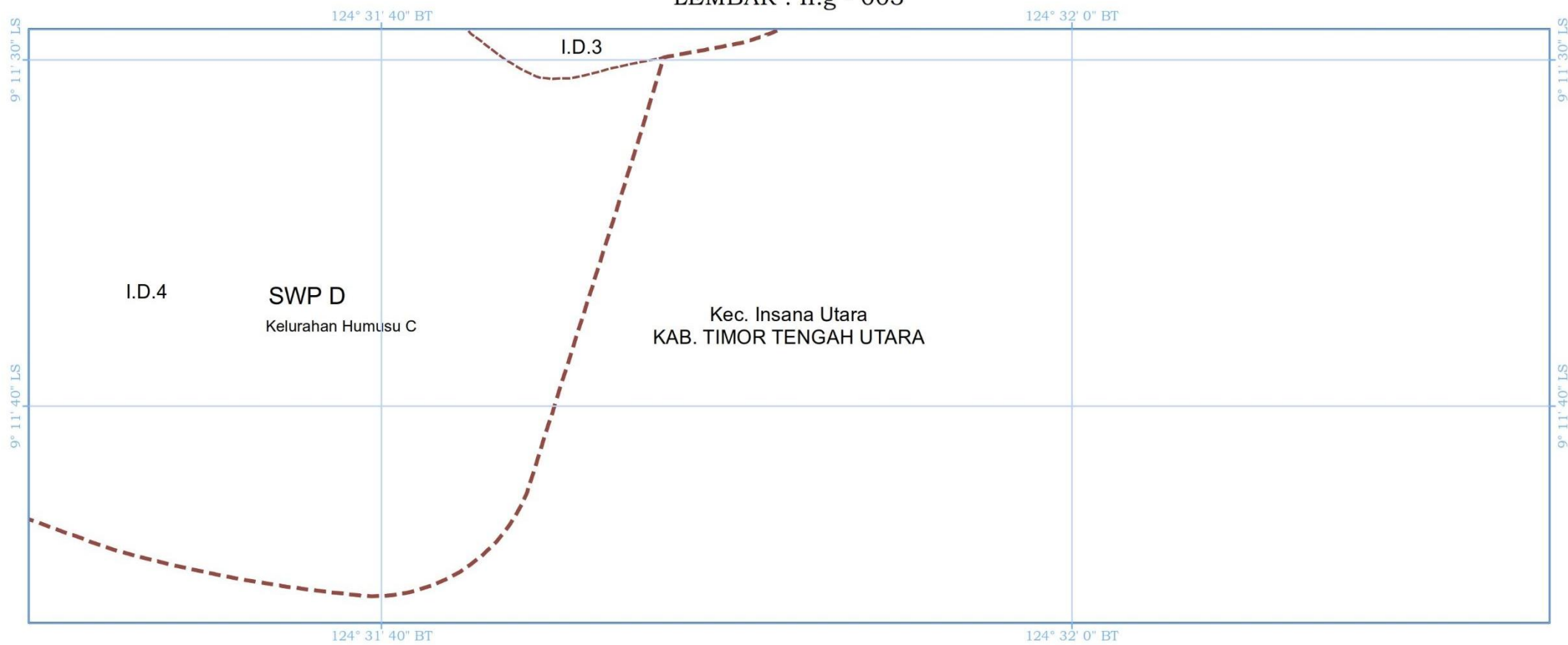
LEMBAR : II.g - 002





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

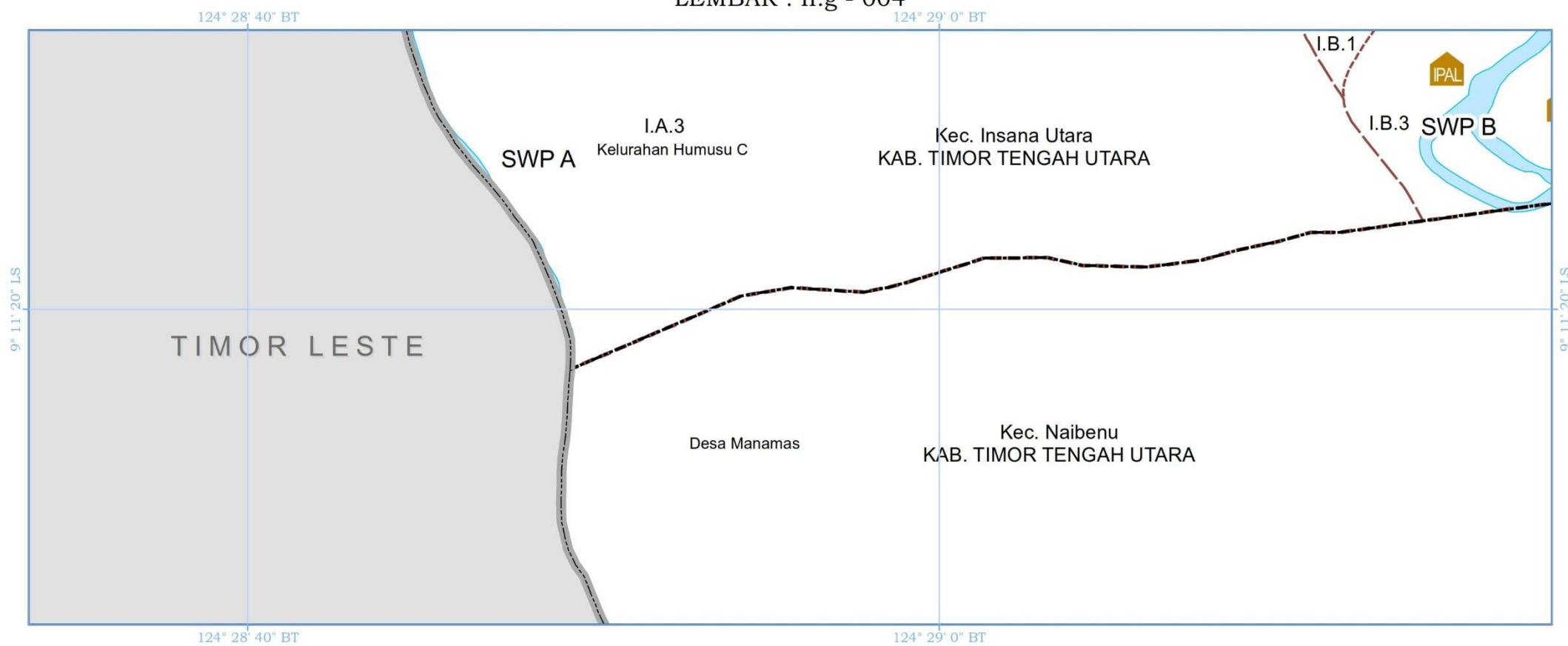
LEMBAR : II.g - 003





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR : II.g - 004

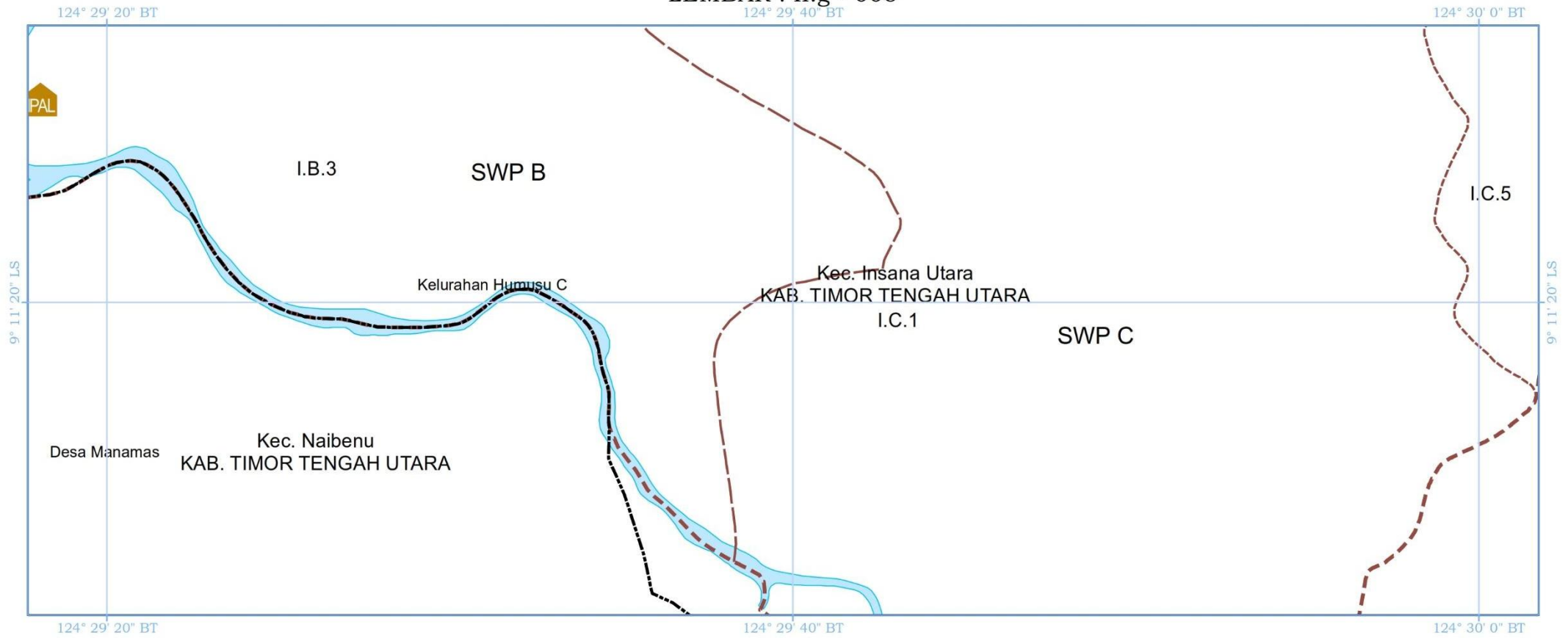


SK No 092258 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

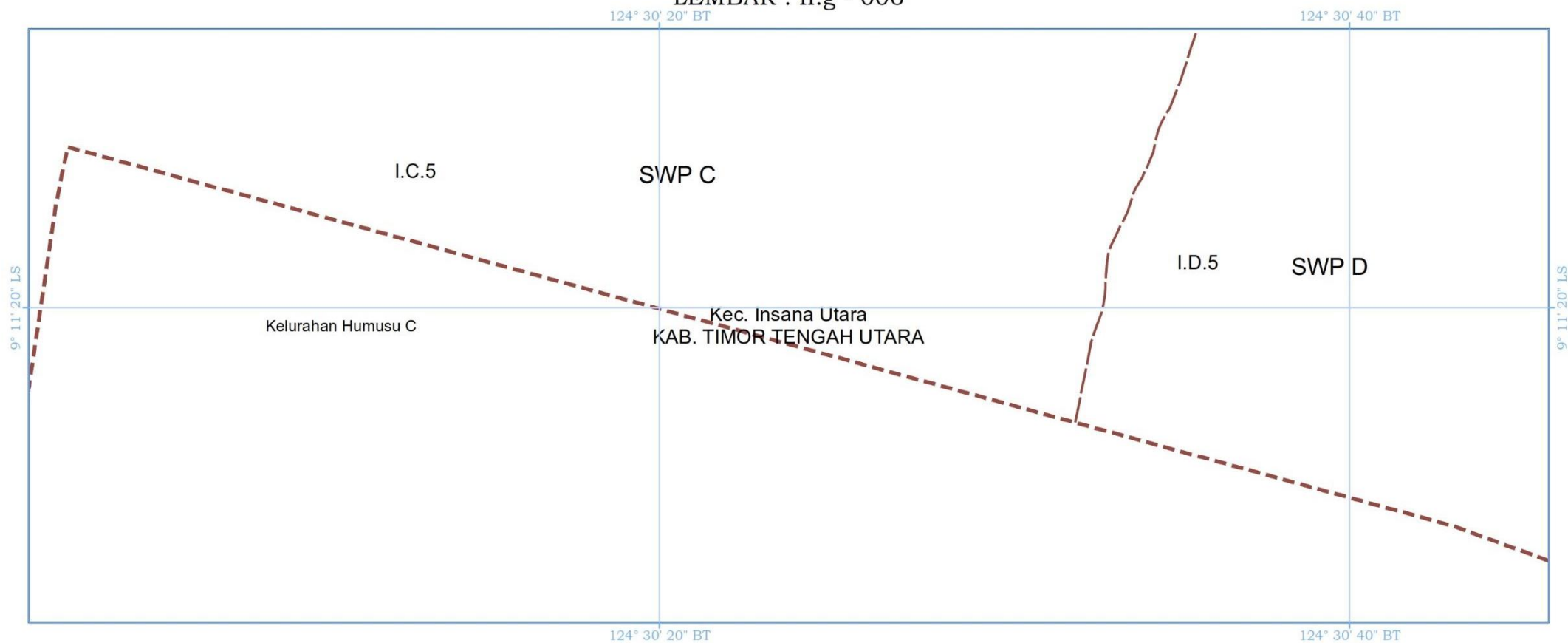
LEMBAR : II.g - 005





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

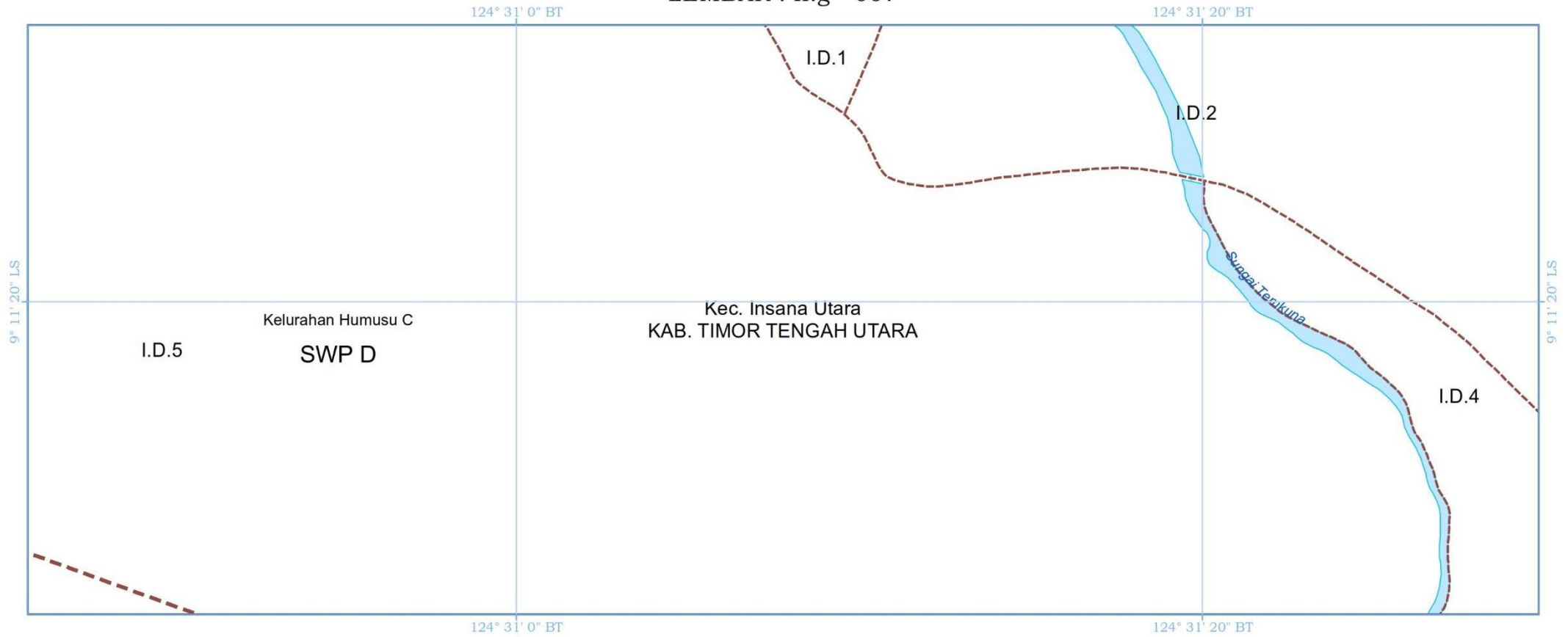
LEMBAR : II.g - 006





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

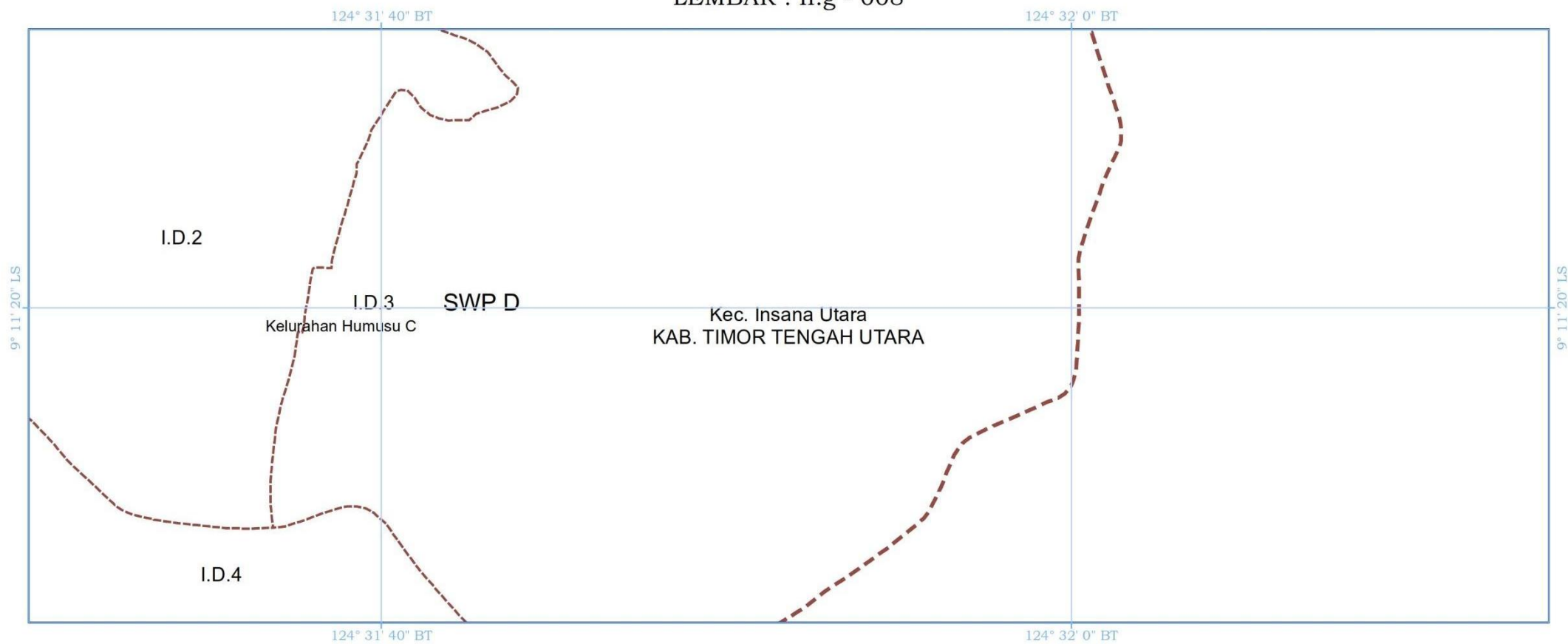
LEMBAR : II.g - 007





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

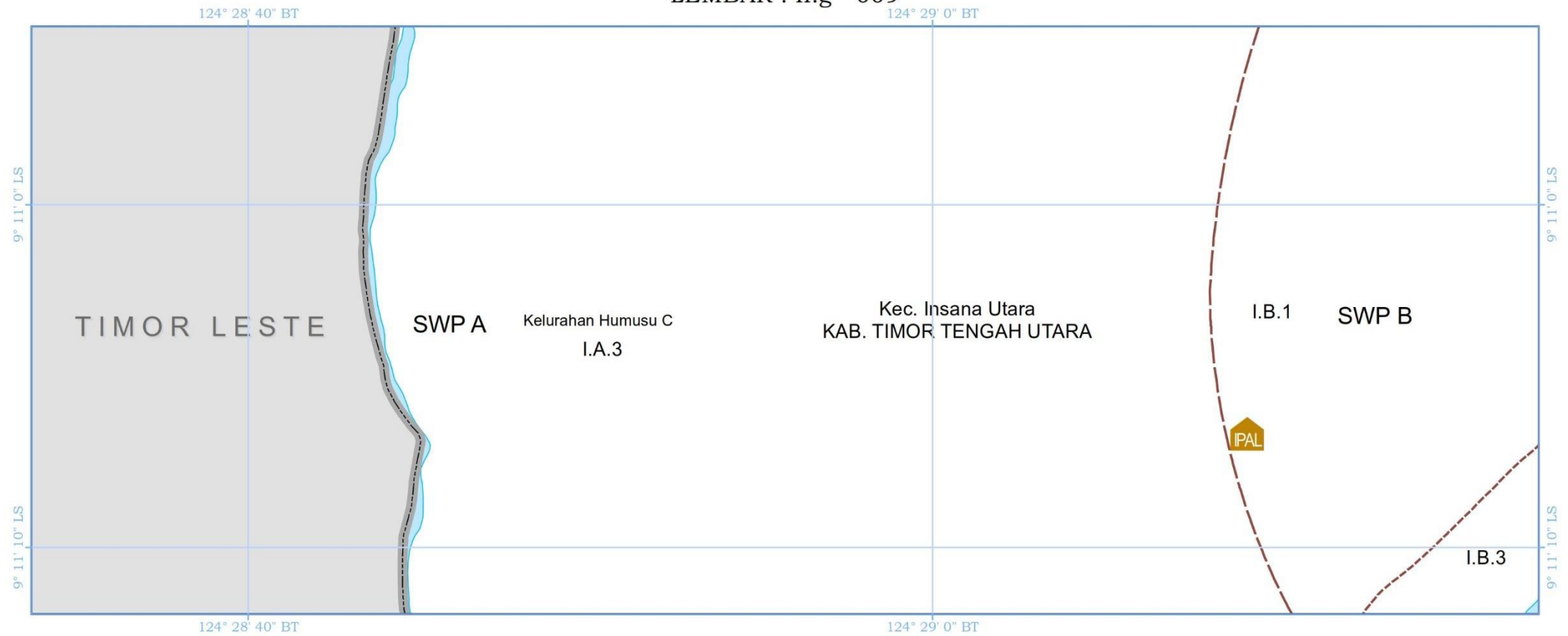
LEMBAR : II.g - 008





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

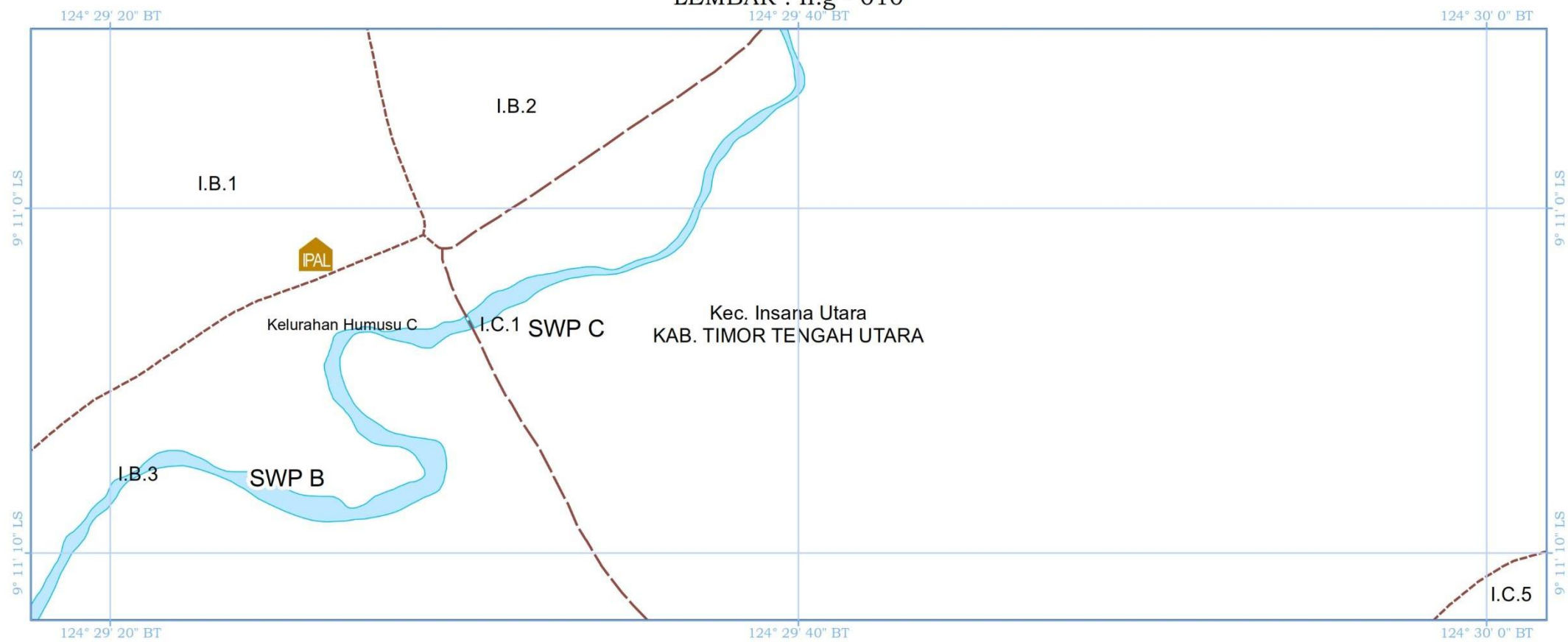
LEMBAR : II.g - 009





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR : II.g - 010

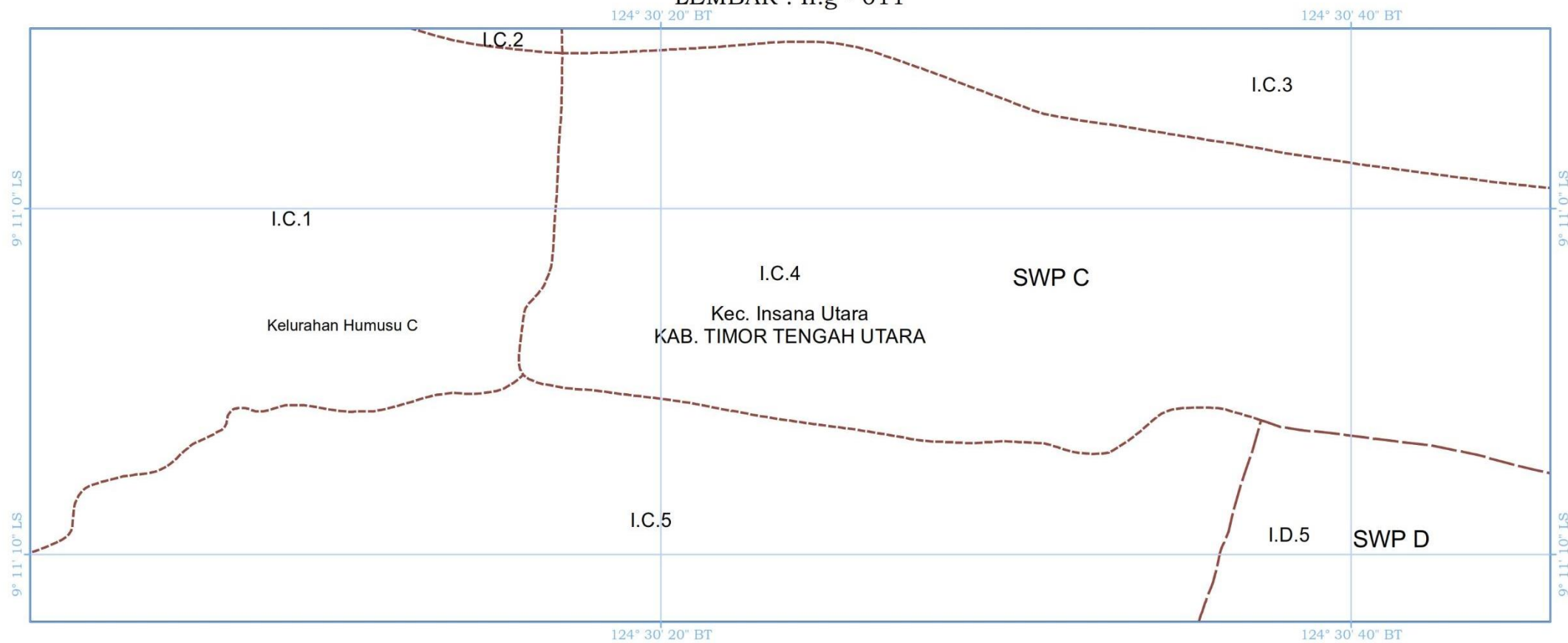


SK No 092264 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

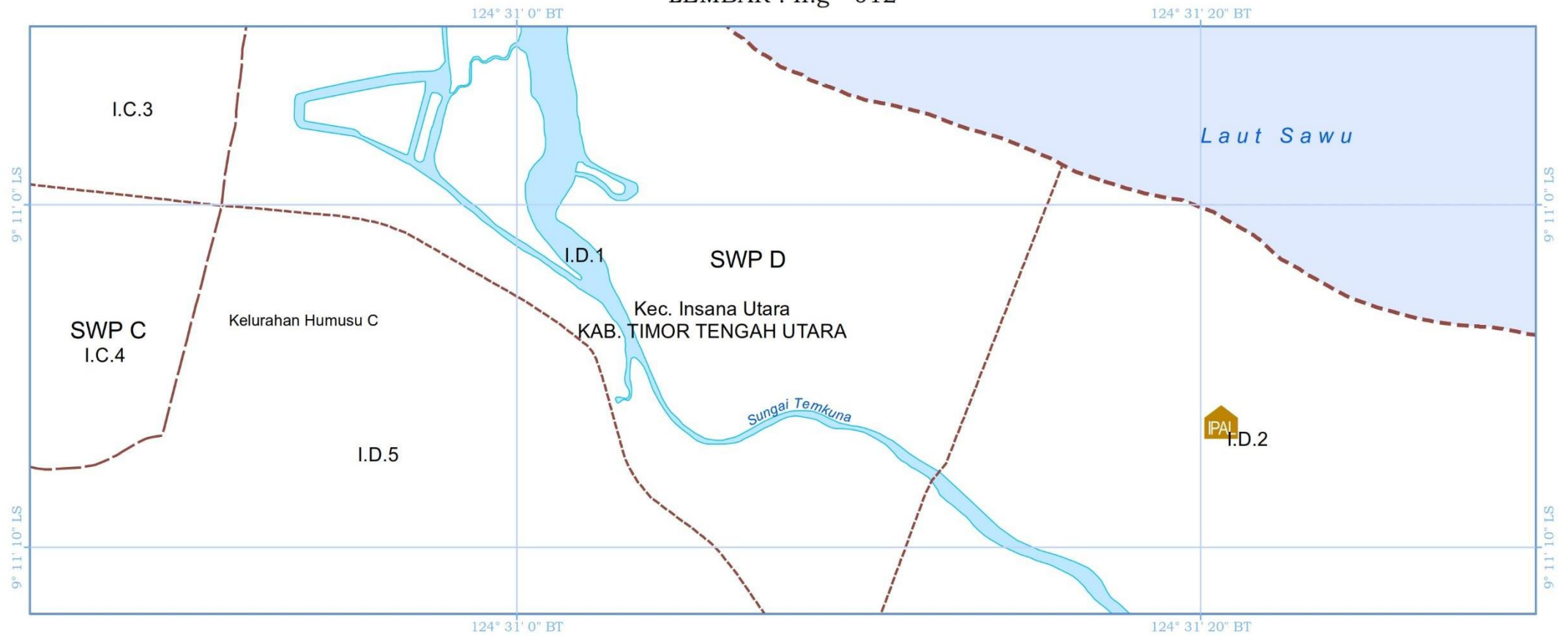
LEMBAR : II.g - 011





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

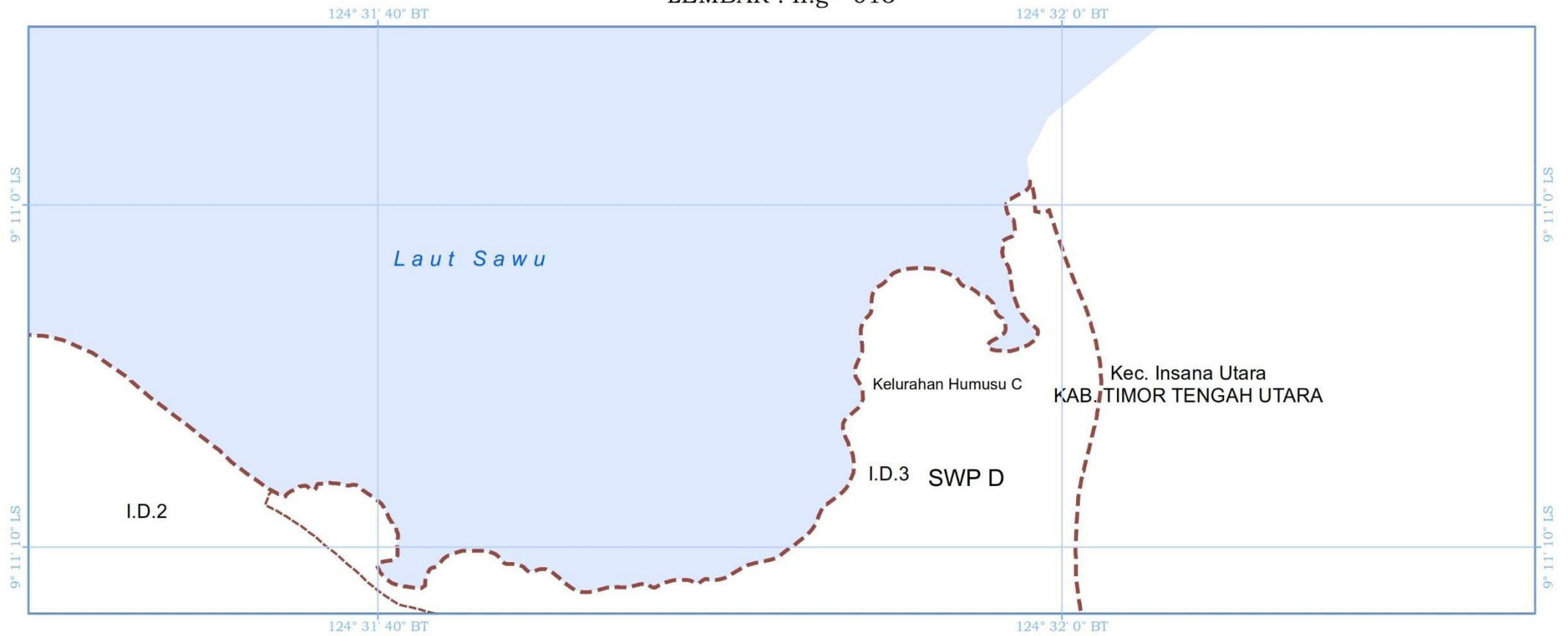
LEMBAR : II.g - 012





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

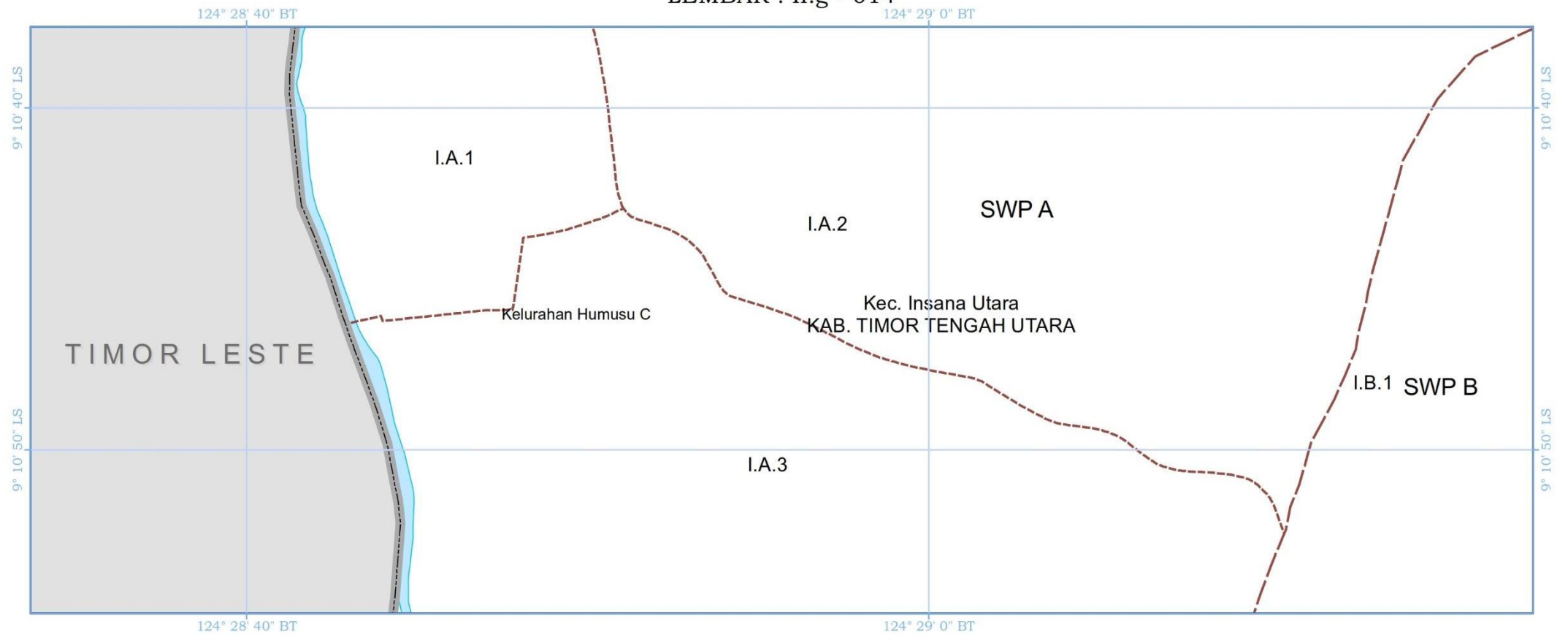
LEMBAR : II.g - 013





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR : II.g - 014

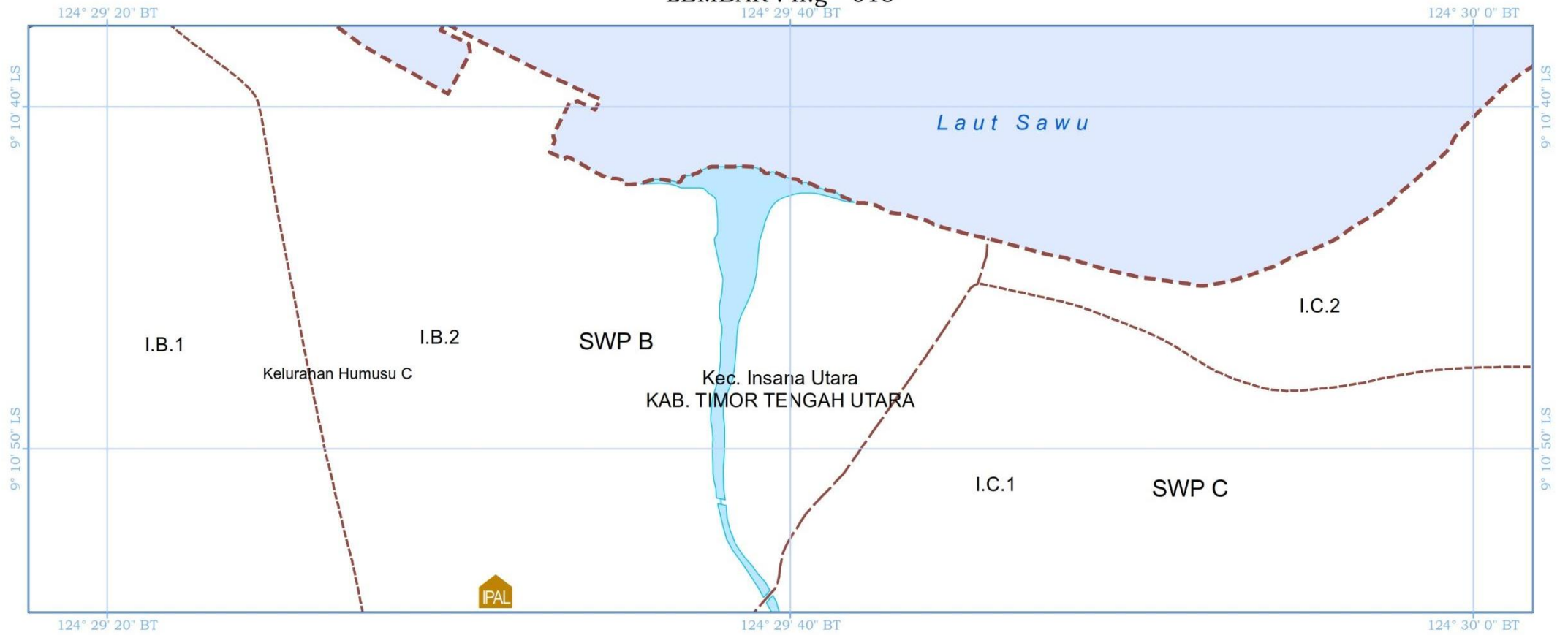


SK No 092268 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

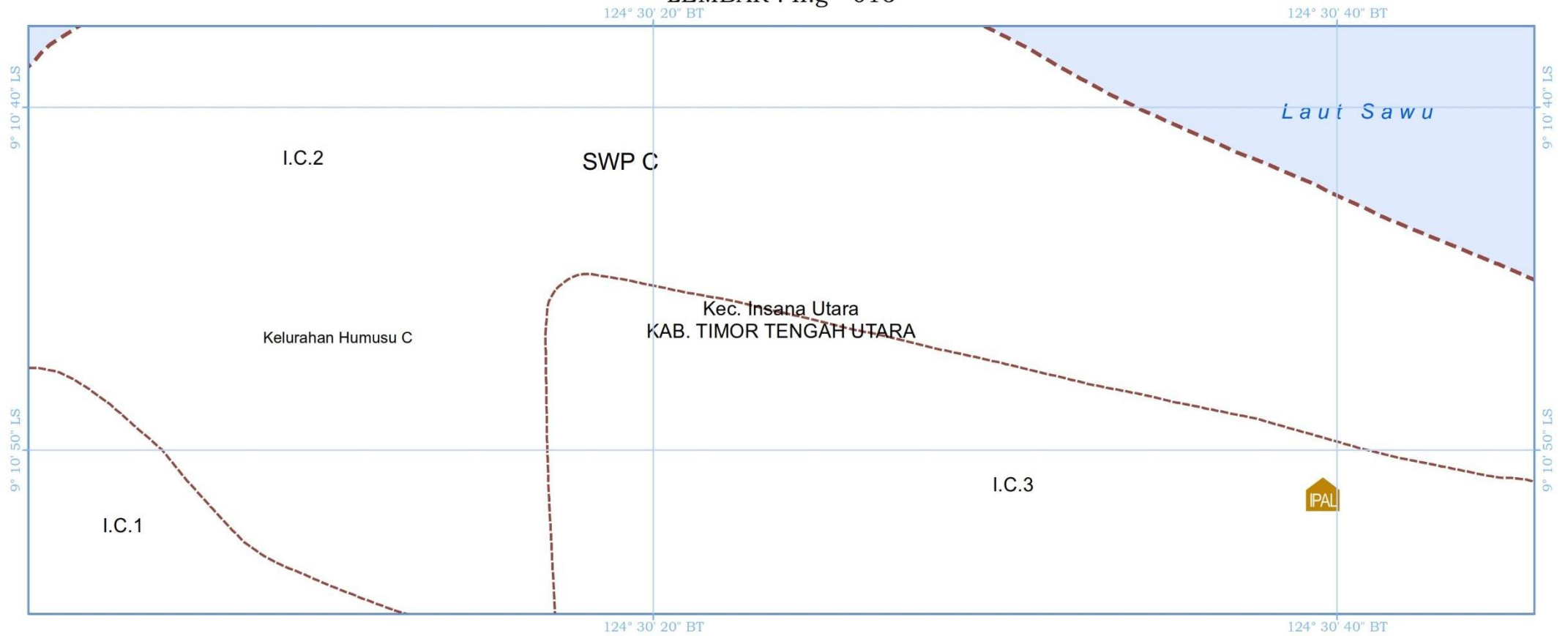
LEMBAR : II.g - 015





PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR : II.g - 016





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR : II.g - 017

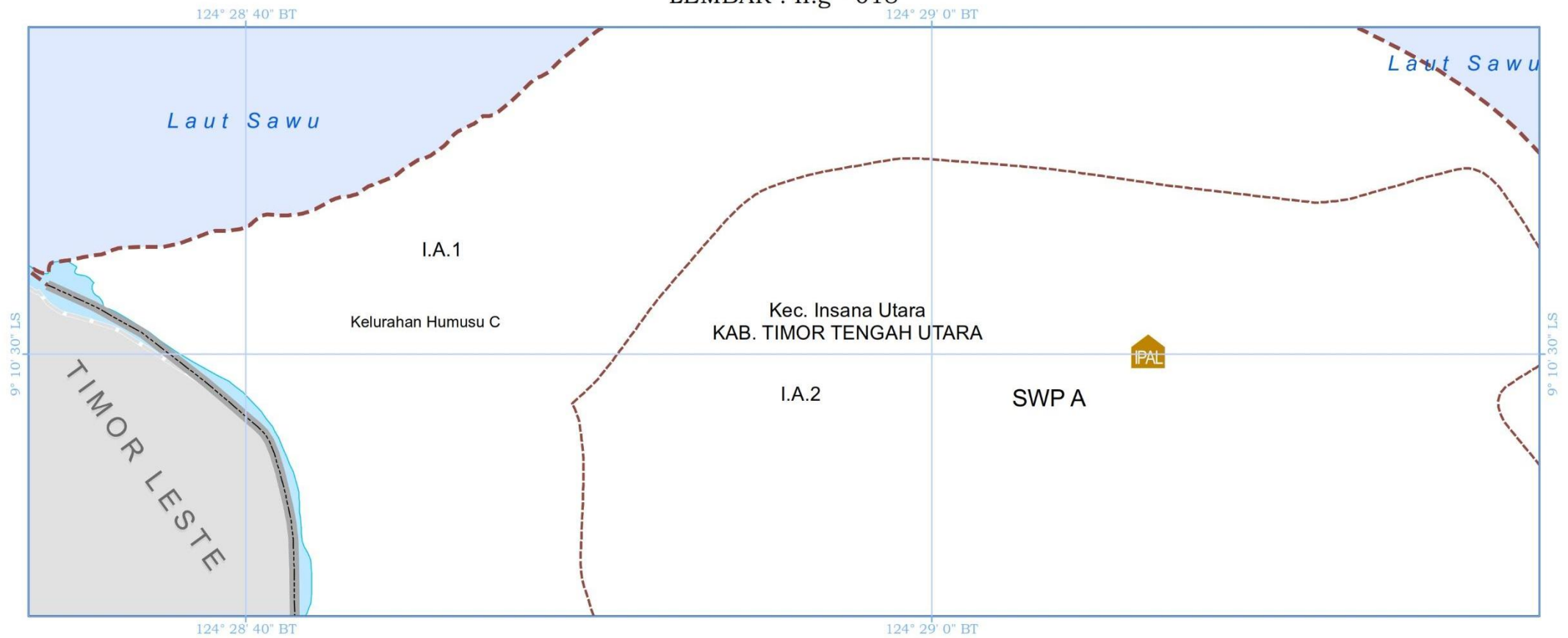


SK No 092271 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

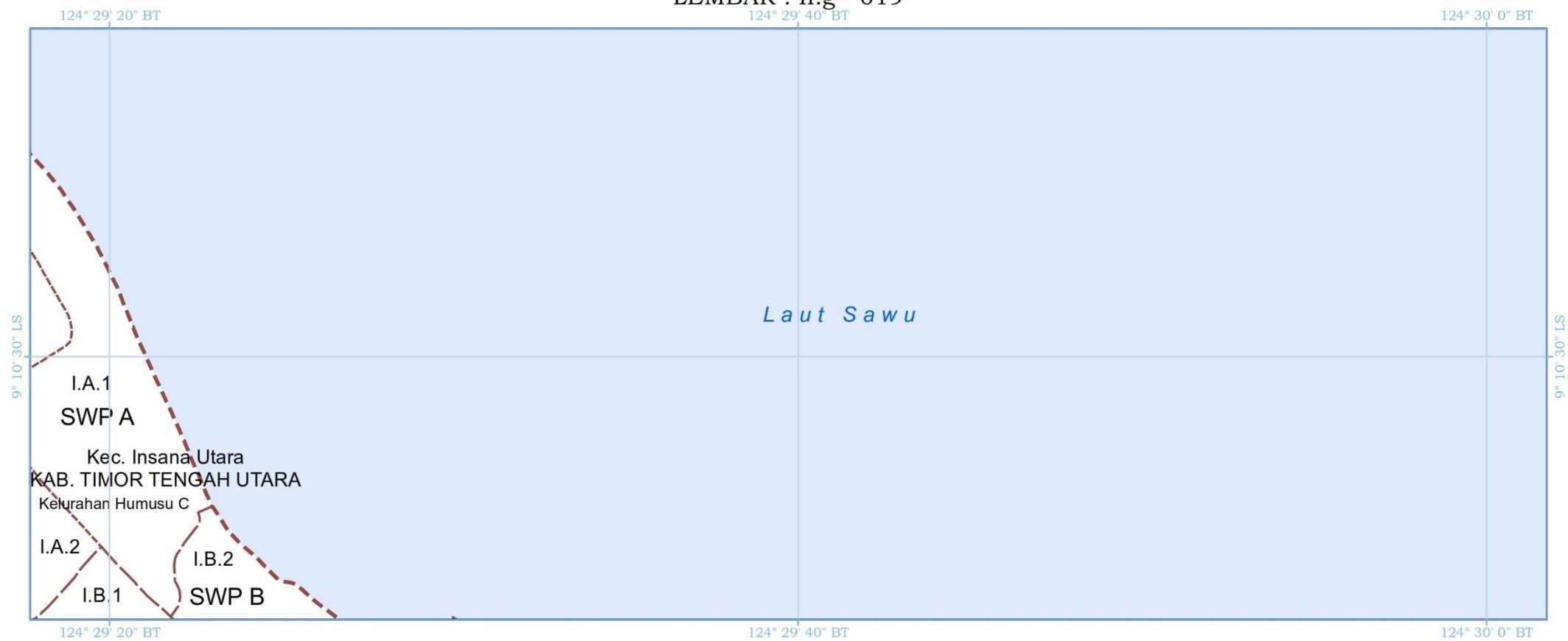
LEMBAR : II.g - 018





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

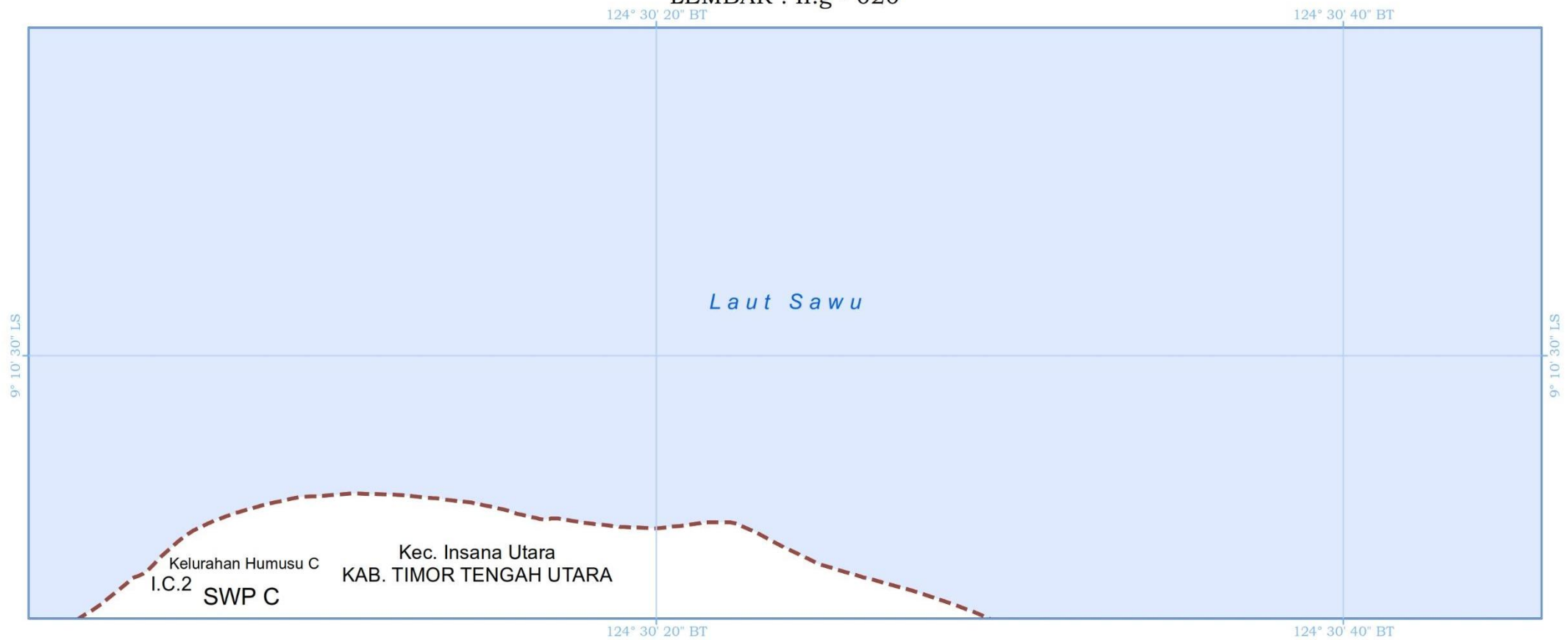
LEMBAR : II.g - 019





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR : II.g - 020

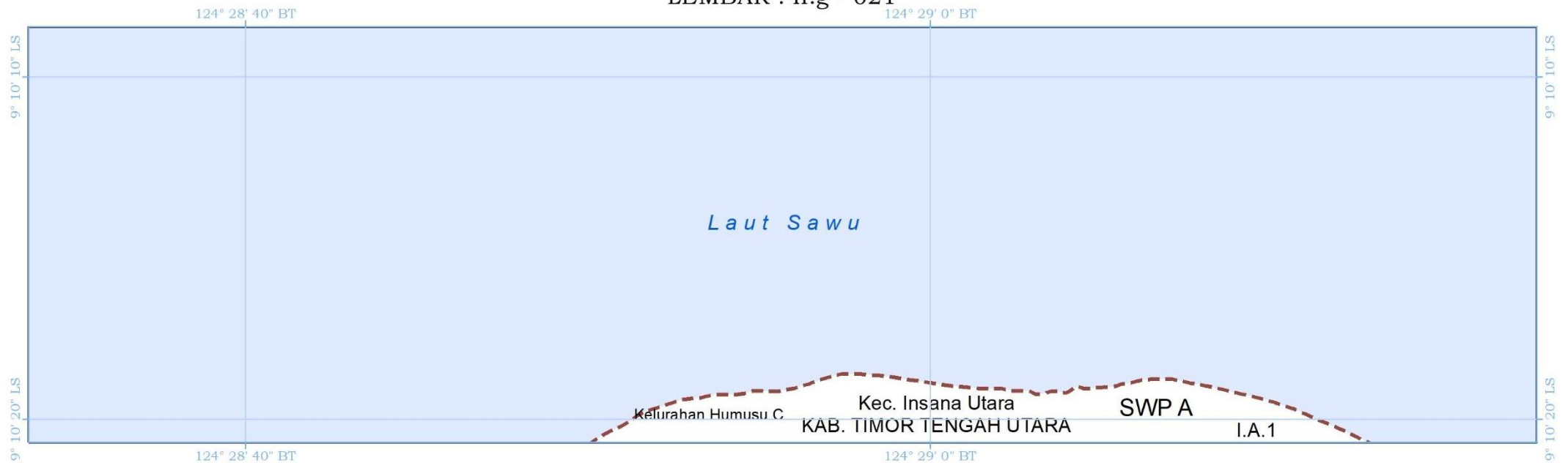


SK No 092274 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR : II.g - 021



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No. 192252 C